



Dewan Desak Audit PDAM

■ Sidang Paripurna 10 Raperda

MELAWI, TRIBUN - Sejumlah fraksi di DPRD Melawi menyoroti kinerja PDAM Tirta Melawi. Mereka menganggap PDAM belum bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dewan juga mengharapkan agar keuangan PDAM dilakukan audit setiap tahunnya.

Hal tersebut terungkap saat rapat paripurna penyampaian pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap 10 raperda, DPRD Melawi, di ruang sidang DPRD Kamis (12/3). Sidang yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin oleh wakil ketua DPRD Melawi Iif Usfayadi.

Juru Bicara Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa DPRD Melawi, Rusli, saat menyampaikan pemandangan umum berharap, agar PDAM Tirta Melawi dapat lebih optimal dalam profesionalitas kinerja untuk memberikan jasa pelayanan air bersih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi. Dia menilai PDAM perlu meningkatkan kinerja terutama menyangkut pelayanan publik.

"Seiring dengan penyeretaan modal yang diperuntukan untuk PDAM namun pencapaian target PDAM selalu terlihat belum mampu memberikan kontribusi bagi keuntungan pemerintah daerah, PDAM harus bekerja secara teliti dan benar dalam menetapkan business plan sehingga penyerapan dan investasi dapat dioptimalkan. Kami juga memandang perlu untuk dilakukan audit terhadap keuangan PDAM se-

“ Kami juga memandang perlu untuk dilakukan audit terhadap keuangan PDAM setiap tahunnya. ”

RUSLI

Jubir Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa

tiap tahunnya," kata Rusli.

Dia mengatakan, DPRD sebagai lembaga pengawas akan mendorong dilaksanakannya audit, baik oleh auditor internal maupun auditor independen, dan kemudian dilaporkannya kepada DPRD. Rusli menambahkan, fraksinya juga menyarankan agar raperda yang terkait dengan penyeretaan modal perlu pengkajian ulang akan asas manfaat, dan nilai keuntungan bagi kepentingan umum.

"Sambil menunggu kejelasan di atas maka ada baiknya saran-saran penting yang disampaikan oleh tiap fraksi dapat didalami maksud dan tujuannya agar tidak menimbulkan dinamika politik daerah, mengingat politik di daerah saat ini sedang hangat," kata Rusli.

Sementara itu Fraksi PDIP, melalui juru bicaranya, Edisun, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, BAB II pasal ke 3 ayat kedua menyebutkan batas usia direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 tahun. "Apakah hal ini sudah sesuai dengan peraturan tersebut," katanya.

Edisun mengungkapkan,

selama ini Pemkab Melawi sudah memberikan dana penyeretaan modal kepada PDAM Tirta Melawi, namun belum ada pendapatan dari PDAM untuk Pemkab Melawi, untuk itu diharapkan ada penjelasan dari pemkab.

"Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), BPK RI atas peyajian nilai penyeretaan modal pemerintah pada PDAM Melawi, sebesar Rp 6 miliar, sedangkan laporan keuangan PDAM Tirta Melawi menyajikan nilai penyeretaan sebesar Rp 9,5 miliar," katanya.

Dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2013, terdapat perbedaan pengakuan nilai penyeretaan antara Pemkab dengan PDAM Tirta Melawi, sebesar Rp 3,5 miliar.

"Namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan BPK RI tanggal 11 Juni 2014, pihak PDAM tirta Melawi belum melakukan koreksi atas selisih penyeretaan modal tersebut," jelasnya.

Sekda Melawi, Ivi Titus Mulyono, yang juga Ketua Dewan Pengawas PDAM Melawi mengatakan, audit terhadap keuangan PDAM sudah dilaksanakan setiap tahun oleh BPK, kemudian hasilnya disampaikan kepada bupati.

"Sedangkan tahun lalu yang melakukan audit akuntan publik, memang seharusnya BPK, namun BPK terbatas personel jadi akuntan yang melakukan audit," katanya.

Dia mengatakan, pada prinsipnya PDAM sudah mempunyai perencanaan sebelum mendapat penyeretaan modal dari pemerintah, akan dikesampingkan nantinya dana yang diberikan tersebut, sedangkan terkait dengan selisih, Ivo menjelaskan itu hanya salah pada pembukuan saja.

"Sedangkan terkait dengan keuntungan, itu karena PDAM belum bisa melakukan hal itu kalau pelayanan kepada masyarakat belum sampai 80 persen, sebenarnya PDAM inikan banyak fungsi sosialnya termasuk untuk mencapai target MDGs, untuk membuat masyarakat sehat, jadi kita tidak mengejar keuntungan melainkan hanya pelayanan kebutuhan air bersih," tandasnya. (ali)